

PENGAJARAN BIPA DAN TES UKBI DALAM UPAYA MENJAGA EKSISTENSI BAHASA INDONESIA DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Wijang Iswara Mukti¹, Andayani², Nugraheni Eko Wardani³

Universitas Sebelas Maret

wijangiswara15@gmail.com¹, bu_anda09@yahoo.co.id²,

nugraheniekowardani_99@yahoo.co.id³

Abstrak

Interaksi antar anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam sebuah pasar tunggal dikhawatirkan dapat membawa dampak negatif pada berbagai bidang termasuk pengakuan terhadap eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai identitas dan pemersatu bangsa harus terus dijaga eksistensinya. Saat ini pemerintah tampak belum mantab melaksanakan strategi yang sudah ditetapkan dalam upaya menjaga eksistensi bahasa Indonesia di era MEA. Di sisi lain, kehadiran MEA membawa daya tarik tersendiri bagi warga negara asing untuk menjalankan bisnis dan investasi di Indonesia. Hal ini membuka peluang bagi bahasa Indonesia untuk bisa diajarkan kepada masyarakat internasional sekaligus membuka peluang bagi bahasa Indonesia untuk bisa dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam integrasi MEA. Pemerintah melalui Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu memantapkan lagi kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan. Peningkatan kualitas program Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) menjadi upaya strategis yang dapat dilakukan pemerintah. Sebagai pendukungnya, sertifikasi Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) bagi warga negara asing yang berkepentingan di Indonesia wajib diberlakukan.

Kata Kunci: Pengajaran BIPA, UKBI, MEA, eksistensi bahasa Indonesia

Pendahuluan

Bahasa merupakan produk kebudayaan yang membedakan satu kelompok manusia baik suku, etnis, maupun bangsa dengan yang lainnya. Bagi bangsa Indonesia, bahasa Indonesia bukan hanya suatu produk kebudayaan melainkan juga pemersatu sekaligus identitas bangsa. Bahasa Indonesia merupakan identitas nasional yang menyatukan ribuan bahasa daerah dan berbagai kelompok etnis yang mendiami kepulauan Nusantara. Hal ini memberi bukti bahwa bahasa Indonesia telah memberikan sumbangan besar pada pembentukan persatuan dan nasionalisme Indonesia (Ubaedillah & Rozak, 2008: 19-21).

Hasil Perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada 25-28 Februari 1975 menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya; serta (4) alat perhubungan antarbudaya dan antardaerah (Muslich, 2010: 6).

ASEAN Economic Community atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bentuk integrasi ekonomi regional Asia

Tenggara yang direncanakan bisa dicapai pada tahun 2015. Tujuan utama MEA adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas serta modal yang lebih bebas (Warta Ekspor Kementerian Perdagangan RI, edisi Januari 2015).

Sejarah munculnya MEA bermula dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada Desember 1997 di Kuala Lumpur. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta menyaingi Tiongkok dan India dalam upaya menarik investasi asing. Para petinggi ASEAN menandatangani dua deklarasi penting yang merupakan tonggak bersejarah dalam perjalanan integrasi ASEAN. Pertama, Deklarasi Kuala Lumpur 2015 yang membahas pemberlakuan Masyarakat ASEAN yang terdiri dari Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Kedua, Deklarasi Kuala Lumpur dengan tema ASEAN 2025: *Forging Ahead Together* dimana kepala negara anggota ASEAN menyepakati visi Masyarakat ASEAN 2025 serta cetak biru Masyarakat Politik Keamanan 2025, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025, dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025. (<http://aeccenter.kemendag.go.id/tentang-aec-2015/sejarah/>)

Meskipun secara visi MEA berfokus pada pemenuhan kesejahteraan di bidang ekonomi kawasan, kehadiran MEA dinilai turut membawa dampak bagi berbagai bidang kehidupan lainnya. MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja baik tenaga kerja profesional maupun non profesional. Kehadiran MEA dipastikan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara di kawasan ASEAN untuk bebas keluar masuk antarkawasan guna mencari pekerjaan, melanjutkan studi, atau kepentingan lainnya. Persaingan kerja antara tenaga kerja asing dan lokal dipastikan akan semakin ketat. Bagi Indonesia, bebas keluar masuknya tenaga kerja asing akan membawa pengaruh bagi kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia termasuk penggunaan Bahasa Indonesia.

Eksistensi bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa di era globalisasi seperti saat ini perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar warga negara Indonesia tidak terbawa pengaruh budaya dan bahasa asing yang cenderung tidak sesuai atau bahkan sangat bertolak belakang dengan jati diri bangsa. Pengaruh arus teknologi informasi yang begitu cepat juga memberikan pengaruh terhadap penggunaan bahasa di masyarakat. Kenyataan ini harus dihadapi dengan sikap yang arif, selektif, dan sadar untuk tetap mempertahankan keberadaan bahasa Indonesia. Persoalan ini erat kaitannya dengan kedisiplinan berbahasa nasional dengan mematuhi semua kaidah atau aturan pemakaian bahasa Indonesia. Disiplin berbahasa nasional oleh setiap warga negara Indonesia akan membawa pengaruh positif bagi eksistensi maupun perkembangan bahasa Indonesia.

Berkaca dari realita internal penggunaan bahasa Indonesia saat ini, bahasa Indonesia mulai tidak digunakan dengan tertib oleh sebagian warga Indonesia sendiri. Kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia pun mulai pudar. Kehadiran MEA yang membawa arus perubahan termasuk datangnya tenaga kerja asing dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda disinyalir akan memperparah kondisi tersebut. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa adanya strategi untuk mempertahankan, bukan tidak mungkin keberadaan bahasa Indonesia akan semakin ditinggalkan. Kebanggaan berbahasa Indonesia akan hilang, dan bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya.

Merujuk pada tujuan utama diberlakukannya MEA, Indonesia merupakan negara dengan jumlah sumber daya manusia maupun potensi sumber daya alam yang melimpah dibanding negara-negara lain di kawasan ASEAN. Jumlah populasi, luas geografi, dan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yang dimiliki Indonesia merupakan yang terbesar di ASEAN. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia berpotensi menjadi ‘pemain besar’ dalam MEA. Berbagai potensi yang dimiliki Indonesia tentu saja turut menarik minat para investor, perkerja terampil, maupun pebisnis lainnya yang berasal dari luar negeri untuk berbisnis di Indonesia (Arifin, dkk, 2008: 291).

Berbagai tantangan yang diungkapkan di atas dapat berubah menjadi peluang apabila pemerintah memiliki kebijakan dan strategi yang mantab untuk menghadapinya. Apabila pemerintah memiliki kebijakan yang tegas dengan mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia bagi siapapun berkepentingan di Indonesia, maka penguasaan bahasa Indonesia menjadi persoalan utama yang harus dipecahkan oleh warga negara asing yang ingin berbisnis di Indonesia. Hal ini tentu saja membuka peluang bagi bahasa Indonesia untuk diajarkan kepada warga negara asing yang ingin berbisnis, berkerja, maupun belajar di Indonesia. Lebih dari itu, bahasa Indonesia bahkan berpotensi menjadi bahasa pengantar dalam MEA.

Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) merupakan program pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya adalah pembelajar asing, bukan penutur asli bahasa Indonesia. Sejalan dengan kehadiran MEA, BIPA menjadi salah satu program yang dipandang tepat untuk mengenalkan budaya dan bahasa Indonesia kepada dunia internasional sekaligus sebagai sarana untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia (Kusmiatun, 2016: 1). Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) merupakan tes standar yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional guna mengevaluasi kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, baik tulis maupun lisan. Sebagai tes bahasa untuk umum, UKBI terbuka bagi setiap penutur bahasa Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Berkaca dari tes TOEFL, UKBI juga dipandang sebagai program yang sangat diharapkan perannya untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia melalui standarisasi evaluasi kemahiran bahasa Indonesia baik bagi penutur asli maupun penutur asing.

Makalah ini merupakan gagasan perihal peran pengajaran Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) dalam upaya menjaga eksistensi bahasa Indonesia era MEA.

Pembahasan

Tujuan Program Pengajaran BIPA

Tujuan pengajaran BIPA secara jelas mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang telah disusun oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebagai contoh, penyelenggaraan terakhir dari Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA IX) yang diselenggarakan pada 30 September - 02 Oktober 2015 di Bali. Konferensi ini mengusung tema “Indonesia: Bumi dalam Transisi Globalisasi, Multikulturalisme, dan Strategi Pengembangan Pengajaran BIPA.” Dari rumusan dan rekomendasi KIPBIPA IX tersebut sudah jelas bahwa adanya pengajaran BIPA adalah upaya untuk melaksanakan amanah dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tersebut. Selain itu, penyelenggaraan KIPBIPA IX maupun penyelenggaraan yang sebelum-sebelumnya sudah pasti juga sebagai salah satu upaya untuk turut meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) memegang peranan penting dalam peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Peran penting ini diwujudkan antara lain dengan mendukung pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing di berbagai negara. Salah satu dukungan itu ialah penyusunan bahan ajar BIPA berupa buku *Sahabatku Indonesia* dalam enam jenjang A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 (Sunendar: 2016).

Berdasarkan hal di atas, tersirat bahwa pengajaran BIPA bertujuan untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional. Seperti halnya bahasa Inggris yang kini menjadi bahasa yang banyak digunakan di pertemuan-pertemuan resmi Internasional, di media elektronik, dan di tempat-tempat umum. Perwujudan pelaksanaan pengajaran BIPA oleh PPSDK yang telah dijelaskan di atas, dituangkan melalui penyusunan bahan ajar BIPA berupa buku *Sahabatku Indonesia* yang telah disesuaikan dari tingkat pemula hingga mahir. Tujuan dari pengajaran BIPA yang hendak dicapai dirumuskan dalam Standar Kompetensi dalam enam tingkatan yang berbeda yakni A1, A2, B1, B2, C1, dan C2, yang secara bertahap dan menyeluruh diharapkan dapat dicapai oleh para pembelajar BIPA.

Pengajaran BIPA berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai. Tujuan ini dapat dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pembelajaran BIPA adalah menjadikan seseorang yang awalnya belum bisa berbahasa Indonesia menjadi bisa berkomunikasi dengan penutur bahasa Indonesia (Kusmiatun, 2016: 37). Tujuan ini memiliki penekanan pada penguasaan bahasa untuk kepentingan praktis sehari-hari seperti menyapa, meminta, mempersilakan, memuji, meminta izin, mengucapkan terima kasih, dan lain sebagainya sehingga cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku. Adapun tujuan khusus berorientasi pada tujuan-tujuan khusus seperti untuk menggali kebudayaan Indonesia, untuk penelitian, untuk studi lanjut, dan lain sebagainya sehingga ciri bahasa yang digunakan cenderung baku dan sesuai kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar (Soewandi, 1994: 4-6); (Suyitno, 2007: 75).

Melalui tujuan pengajaran BIPA di atas dapat disimpulkan bahwa pengajaran BIPA memegang peran penting dalam mengajarkan dan mengenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat internasional sehingga memberikan sumbangan bagi penjagaan eksistensi bahasa Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan kualitas pengajaran BIPA secara berkesinambungan baik dari segi kurikulum, pengajar, materi pembelajaran, media, maupun sarana dan prasarana menjadi prioritas yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Sertifikasi Uji Kemahiran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing

Setelah pelaksanaan Program Pengajaran BIPA, strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya menjaga eksistensi bahasa Indonesia adalah dengan menetapkan standar baku melalui Uji Kemampuan Bahasa Indonesia. Apabila program BIPA berfokus pengenalan dan pengajaran bahasa Indonesia, maka UKBI berfokus pada evaluasi dan sertifikasi kemahiran bahasa Indonesia.

UKBI memiliki fungsi yang sangat strategis. Tidak hanya digunakan untuk mengukur penguasaan berbahasa Indonesia seseorang, tetapi juga merupakan sarana yang efektif untuk menumbuhkan kebanggaan dan rasa positif masyarakat Indonesia terhadap bahasanya. UKBI sebagai sarana untuk menentukan kemahiran berbahasa Indonesia di kalangan masyarakat dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 152/U/2003 tanggal 28 Oktober 2003. Melalui UKBI seseorang dapat mengetahui secara akurat informasi tentang tingkat kemahirannya dalam berbahasa Indonesia. UKBI sudah terdaftar dan mendapat pengakuan dari

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 8 Januari 2004 dengan Hak Cipta Nomor 023993 dan 023994. Dengan diluncurkannya UKBI oleh Menteri Pendidikan Nasional Pada tanggal 13 Juli 2006, UKBI menjadi sebuah tes resmi yang digunakan di kalangan masyarakat (<http://ukbi.kemdikbud.go.id/tentang.php>).

Pengujian UKBI dilaksanakan di Pusat Bahasa, Balai Bahasa, atau di tempat lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang layak sebagai tempat untuk ujian. UKBI dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu UKBI berbasis kertas dan pensil atau UKBI berbasis komputer yang lebih dikenal dengan UKBI dalam jaringan (UKBI Daring) atau UKBI *On-line*.

UKBI memang sudah diberlakukan sejak tahun 2006, namun dalam pelaksanaannya, pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa masih perlu meningkatkan kualitas UKBI terutama dari sisi pelaksanaannya yang harus tegas untuk mewajibkan sertifikasi UKBI bagi warga negara asing baik yang hendak melamar sebagai tenaga kerja maupun warga negara asing yang hendak melanjutkan studi di Indonesia. Apabila pelaksanaan UKBI semakin berkualitas dan tegas, seperti halnya ujian TOEFL pada kemampuan berbahasa Inggris, UKBI ini akan membawa implikasi bagi warga negara asing untuk lebih bersemangat dalam mempelajari bahasa Indonesia sehingga pengajaran BIPA pun menjadi semakin bergairah pula. Dengan demikian, eksistensi dan martabat bahasa Indonesia di kancah MEA maupun internasional bisa terus terjaga.

Kesimpulan

Pengajaran BIPA merupakan salah satu upaya melaksanakan amanah dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang telah disusun oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia dan meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Untuk menggairahkan pengajaran BIPA baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pemerintah harus merancang konsep baku UKBI sebagai syarat wajib diikuti bagi warga negara asing yang hendak melanjutkan studi maupun bekerja di Indonesia. Peningkatan mutu pengajaran BIPA dan sertifikasi UKBI merupakan upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional maupun menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam integrasi MEA.

Referensi

- Arifin, (dkk). (2007). *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Sahabatku Indonesia: Buku Ajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing Tingkat A1, A2, B1, B2, C1, dan C2*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Chaer, Abdul. (2013). *Pembinaan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Iskandarwassid., Sunendar, Dadang. (2011). *Strategi Pembelajaran Bahasa*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Perdagangan RI. (2015). *Peluang dan Tantangan Indonesia di Pasar Bebas MEA*. *Warta Ekspor*. Edisi Januari 2015. <http://djpen.kemendag.go.id/>
- Kusmiatun, Ari. (2016). *Mengenal BIPA (Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing) dan Pembelajarannya*. Yogyakarta: Penerbit K-Media

- Muslich, Masnur. (2010). *Bahasa Indonesia Pada Era Globalisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soewandi, A.M. (1994). *Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing: Tujuan, Pendekatan, Bahan Ajar, dan Pengurutannya*. KIPBIPA UKSW: Salatiga.
- Suyitno, Imam. (2007). Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) berdasarkan Hasil Analisis Kebutuhan Belajar. *Jurnal Wacana*. Vol. 9, No. 1, (62-78).
<http://wacana.ui.ac.id/index.php/wjhi/article/download/223/212/>
- Ubaedillah, A & Rozak, A. (2008). *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.